ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM DALAM SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA:NAHDLATUL ULAMA(NU) 1908-1927

Humaida[1], Dini Hariyanti[2], Citra Putri Salma[3], Annisa Viki Aulia[4], Etmi Hardi[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : humaidanst@gmail.com[1], dhariyanti05@gmail.com[2], citraputrisalma@gmail.com[3], annisavikiaulia815@gmail.com[4], etmihardi@fis.unp.ac.id[5]

ABSTRACT

This study examines the background to the founding of Nahdlatul Ulama (NU) and its role and impact on the Indonesian national movement in the early 20th century, particularly from 1908 to 1927. This study places NU within the context of the social, political, religious, and intellectual dynamics that developed during Dutch colonialism, the Indonesian national awakening, and the currents of Islamic reformism from the Middle East. NU emerged from a long process of transformation within the Islamic boarding school (pesantren) ulama movement, which had previously formed predecessor organizations such as Nahdlatuttujjar, Taswirul Afkar, and Nahdlatul Wathan in response to economic, educational, and nationalist challenges for Muslims. The study's findings demonstrate that NU served not only as a religious organization but also as a socio-cultural and political force contributing to the formation of national consciousness. This role was realized through strengthening Islamic boarding school education as a basis for cultural resistance, developing da'wah (Islamic outreach) that instilled religious nationalism, and maintaining a non-cooperative stance toward Dutch colonialism. Furthermore, NU played a role in maintaining the Ahlussunnah wal Jama'ah tradition amidst the currents of Islamic modernism and reformism, as well as building social solidarity through a network of Islamic boarding schools (pesantren) and religious activities. Thus, NU can be understood as an organization that successfully integrated Islamic values with national spirit, thus becoming a crucial foundation in the development of the Indonesian national movement. NU's role in this early period demonstrated that religion can be an effective instrument of social mobilization in fostering anti-colonial awareness and strengthening Indonesian national identity.

Keywords : *Nahdlatul Ulama, Indonesian National Movement, Dutch Colonialism, Islamic Boarding Schools, Traditional Islam, Religious Nationalism, Ahlussunnah Wal Jama'ah.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) serta peran dan dampaknya dalam pergerakan nasional Indonesia pada periode awal abad ke-20, khususnya 1908–1927. Kajian ini menempatkan NU dalam konteks dinamika sosial, politik, keagamaan, dan intelektual yang berkembang pada masa kolonialisme Belanda, kebangkitan nasional Indonesia, serta arus reformisme Islam dari Timur Tengah. NU lahir dari proses panjang transformasi gerakan ulama pesantren yang sebelumnya telah membentuk organisasi pendahulu seperti Nahdlatuttujjar, Taswirul Afkar, dan Nahdlatul Wathan sebagai respons terhadap persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran kebangsaan umat Islam.Hasil kajian menunjukkan bahwa NU tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-kultural dan politik yang berkontribusi dalam pembentukan kesadaran nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan pendidikan pesantren sebagai basis perlawanan kultural, pengembangan dakwah yang menanamkan nasionalisme religius, serta sikap nonkooperatif terhadap kolonialisme Belanda. Selain itu, NU juga berperan dalam mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah arus modernisme dan reformisme Islam, serta membangun solidaritas sosial masyarakat melalui jaringan pesantren dan aktivitas keagamaan. Dengan demikian, NU dapat dipahami sebagai organisasi yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan, sehingga menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan gerakan nasional Indonesia. Peran NU pada periode awal ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi instrumen mobilisasi sosial yang efektif dalam membentuk kesadaran anti-kolonial dan memperkuat identitas kebangsaan Indonesia.

Kata Kunci : *Nahdlatul Ulama, Pergerakan Nasional Indonesia, Kolonialisme Belanda, Pesantren, Islam Tradisional, Nasionalisme Religius, Ahlussunnah Wal Jama'ah*

PENDAHULUAN

Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) pada awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari dinamika besar yang melingkupi masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Pada periode tersebut, masyarakat pribumi mulai menunjukkan kesadaran baru terhadap pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan melawan penjajahan. Kebangkitan ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang memperlihatkan meningkatnya kesadaran kolektif bangsa Indonesia dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan.

Dalam konteks tersebut, ulama pesantren memainkan peran strategis sebagai penjaga tradisi keislaman sekaligus agen perubahan sosial. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, solidaritas sosial, dan kesadaran kebangsaan. Sebelum berdirinya NU secara resmi, telah muncul berbagai organisasi pendahulu yang menunjukkan transformasi pemikiran ulama pesantren, seperti Nahdlatuttujjar yang berfokus pada penguatan ekonomi umat, Taswirul Afkar sebagai ruang intelektual, serta Nahdlatul Wathan yang menanamkan semangat nasionalisme melalui pendidikan Islam.

Selain faktor internal, berdirinya NU juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal dunia Islam, khususnya perubahan politik di wilayah Hijaz serta berkembangnya gerakan reformisme Islam di Indonesia. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama tradisional terhadap keberlangsungan praktik keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah yang selama ini menjadi bagian penting dari tradisi Islam Nusantara. Ketegangan antara kelompok tradisionalis dan reformis semakin memperkuat kebutuhan akan organisasi yang mampu menyatukan ulama pesantren dalam satu wadah perjuangan.

Puncak dari proses tersebut adalah pembentukan Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 di Surabaya. NU kemudian berkembang sebagai organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebangsaan. Melalui jaringan pesantren, dakwah, serta konsolidasi ulama, NU berperan penting dalam membangun kesadaran anti-kolonial dan memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai NU menjadi penting untuk memahami bagaimana agama, khususnya Islam tradisional, berkontribusi dalam proses pembentukan gerakan nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia tahun 1908–1927. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini menekankan pada analisis deskriptif terhadap fenomena sosial, politik, pendidikan, dan keagamaan yang berkembang pada masa kolonial Belanda, khususnya berkaitan dengan perkembangan organisasi Islam tradisional di Indonesia. Pendekatan historis-deskriptif digunakan untuk mengkaji latar belakang berdirinya NU, perkembangan organisasi, serta kontribusinya dalam membangun kesadaran kebangsaan melalui pendidikan pesantren, dakwah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama dan pergerakan nasional Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi

kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial dalam perkembangan nasionalisme Indonesia (Taslima, 2020: 154-155).

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)

Pembahasan mengenai berdirinya Nahdlatul Ulama pada periode 1908–1927 tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, dan keagamaan dunia Islam pada awal abad ke-20. Pada masa tersebut, umat Islam di Indonesia menghadapi tekanan kolonialisme Belanda sekaligus arus pembaruan pemikiran Islam yang berkembang dari Timur Tengah. Menurut Nasrullah, Bahaking Rama, dan Andi Achruh (2023: 21), tahun 1908 menjadi titik awal kebangkitan nasional Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, kemudian diikuti munculnya organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Kehadiran organisasi tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat pribumi mengenai pentingnya pendidikan, persatuan, dan perjuangan melawan kolonialisme. Selain itu, Moh. Romzi (2012: 42) menjelaskan bahwa ulama pesantren memiliki peran sentral dalam mempertahankan tradisi Islam sekaligus merespons perubahan sosial yang berkembang di masyarakat.

Di lingkungan pesantren, para ulama tradisional memandang bahwa perubahan zaman harus dihadapi melalui pembentukan organisasi yang lebih modern tanpa meninggalkan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum berdirinya NU, para ulama terlebih dahulu mendirikan Nahdlatuttujjar pada tahun 1918 sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Organisasi tersebut dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama para saudagar Muslim dengan tujuan memperkuat ekonomi umat Islam pribumi yang tertinggal akibat dominasi ekonomi kolonial dan pedagang asing. Keberadaan Nahdlatuttujjar menunjukkan bahwa ulama pesantren tidak hanya berfokus pada persoalan ibadah, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perjuangan ulama pesantren kemudian berkembang dalam bidang pemikiran melalui berdirinya Taswirul Afkar pada tahun 1922. Organisasi ini menjadi ruang diskusi intelektual bagi para ulama muda pesantren untuk membahas persoalan agama, pendidikan, budaya, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Taswirul Afkar berperan penting dalam membentuk kesadaran intelektual kalangan pesantren agar mampu menghadapi tantangan modernitas tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam klasik. Forum ini juga menjadi benteng pertahanan tradisi bermazhab dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di tengah berkembangnya gerakan pemurnian Islam di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 1924 berdiri Nahdlatul Wathan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebangsaan. organisasi tersebut bertujuan menanamkan semangat cinta tanah air melalui pendidikan Islam. Berdirinya Nahdlatul Wathan menunjukkan bahwa ulama pesantren memiliki perhatian besar terhadap masa depan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang berkembang di lingkungan pesantren menjadi bukti bahwa perjuangan keagamaan berjalan seiring dengan perjuangan kebangsaan. Pendidikan dipandang sebagai sarana utama dalam membentuk masyarakat Muslim yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kesadaran nasional.

Selain faktor internal di Indonesia, berdirinya NU juga dipengaruhi oleh perkembangan dunia Islam internasional. Menurut Nur Khalik Ridwan dan Ali Usman (2023: 23), pada awal abad ke-20 wilayah Hijaz yang meliputi Makkah dan Madinah berada di bawah kekuasaan kelompok Wahhabi yang dipimpin oleh Ibnu Saud. Kelompok tersebut membawa gagasan pemurnian Islam yang menolak praktik-praktik keagamaan seperti tawasul, ziarah kubur, dan tradisi tasawuf yang berkembang di kalangan umat Islam tradisional. Perubahan politik di Hijaz menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama pesantren Indonesia karena dikhawatirkan kebebasan menjalankan mazhab dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah akan dibatasi.

Pada saat yang sama, di Indonesia berkembang gerakan pembaruan Islam yang dipengaruhi pemikiran Timur Tengah. Tokoh-tokoh seperti Syaikh Ahmad Surkati, KH. Ahmad Dahlan, dan A. Hassan membawa gagasan pemurnian ajaran Islam serta kritik terhadap praktik keagamaan tradisional yang berkembang di pesantren. Kontestasi pemikiran tersebut mendorong ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang mampu mempertahankan tradisi bermazhab, tasawuf, dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara terorganisasi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, para ulama pesantren mengadakan rapat besar di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Menurut Nur Khalik Ridwan dan Ali Usman (2023: 24), rapat tersebut menghasilkan keputusan penting berupa pembentukan Komite Hijaz dan pendirian Nahdlatul Ulama.

Komite Hijaz dibentuk untuk menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia kepada penguasa Hijaz agar kebebasan menjalankan mazhab tetap terjaga di tanah suci. Pendirian NU menjadi langkah strategis untuk menyatukan ulama pesantren dalam satu organisasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mempertahankan tradisi Islam Nusantara.NU kemudian didaftarkan kepada pemerintah Hindia Belanda dan memperoleh pengesahan resmi pada tanggal 6 Februari 1930. Menurut Nur Khalik Ridwan dan Ali Usman (2023: 25), dalam statuten awal NU disebutkan bahwa tujuan organisasi adalah "memegang teguh salah satu mazhab imam empat dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal NU tidak hanya bergerak dalam bidang ibadah dan dakwah, tetapi juga terbuka terhadap berbagai usaha sosial, pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, NU melaksanakan berbagai langkah seperti mempererat hubungan antarulama, mengembangkan pesantren dan madrasah, memperhatikan kesejahteraan fakir miskin dan anak yatim, serta memajukan sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal berdiri NU memiliki karakter sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas. Pada tahun 1927, NU mulai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan Islam.Dalam Muktamar II NU dibahas upaya perbaikan metode pengajaran di pesantren dan madrasah agar pendidikan Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pesantren dipandang sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pembentukan moral masyarakat Muslim. Dari perkembangan tersebut, NU kemudian tumbuh menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan pesantren, madrasah, dan lembaga sosial yang luas.

Tokoh Tokoh Penting Nahdlatul Ulama (NU) Pergerakan Nasional Indonesia

Tokoh-Tokoh Penting Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebagai berikut:

a. KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh utama dalam lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Rais Akbar pertama organisasi tersebut. Beliau dikenal sebagai ulama kharismatik yang memiliki pengaruh besar di lingkungan pesantren dan berperan penting dalam memberikan dasar

keagamaan bagi berdirinya NU. Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari berfokus pada upaya mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang berpijak pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah. Selain itu, beliau juga mendirikan Pesantren Tebuireng yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam tradisional terbesar di Indonesia.

Dalam proses pendirian NU, KH. Hasyim Asy'ari bersama KH. Abdul Wahab Hasbullah membentuk organisasi tersebut sebagai respons terhadap berkembangnya paham Wahabi yang dinilai mengancam tradisi keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Kehadiran NU bertujuan menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai bentuk pemahaman Islam yang moderat dan inklusif, sekaligus melindungi tradisi Islam lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Pendirian NU pada dasarnya merupakan hasil perjuangan kolektif para ulama dari berbagai daerah di Jawa dan Madura. Rapat pendirian NU di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H dihadiri sejumlah ulama besar, seperti KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng, KH. Bisri Denanyar Jombang, KH. Ridwan Semarang, KH. Nawawi Pasuruan, KH.R. Asnawi Kudus, KHR. Hambali Kudus, KH. Nachrawi Malang, dan KH. Doro Muntaha, menantu KH. Kholil Bangkalan.

Meskipun tokoh-tokoh tersebut belum mencerminkan seluruh pendiri NU. Berdasarkan karya KH. Abdul Chalim Leuwimunding dalam Sadjarah Perjuangan Kyai Hajj Abdul Wahab, proses lahirnya NU berawal dari gerakan Nahdlatul Wathan-Syubbanul Wathan, Taswirul Afkar, dan rapat-rapat Komite Hijaz. Para ulama yang aktif dalam organisasi dan forum tersebut dapat dikategorikan sebagai pendiri NU. KH. Abdul Chalim Leuwimunding menjelaskan bahwa para ulama yang hadir berasal dari berbagai wilayah seperti Kudus, Semarang, Tegal, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Madura, Gresik, Bangil, Bangkalan, Mojokerto, serta beberapa daerah lain di Jawa dan Madura. Selain itu, terdapat pula dukungan dari ulama Jawa Barat dan kawasan timur Jawa. Dengan demikian, para pendiri NU pada hakikatnya merupakan kalangan ulama pesantren yang memiliki tujuan bersama dalam mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dan menjaga tradisi Islam Nusantara.

Pada masa pendudukan Jepang, KH. Hasyim Asy'ari menunjukkan sikap yang tegas dengan menolak melakukan Saikerei karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap tersebut memperlihatkan komitmen beliau dalam menjaga prinsip-prinsip agama sekaligus mempertahankan martabat umat Islam. (Nana Aprillia dkk., 2025: 409-410).

b. KH. Abdul Wahab Hasbullah

KH. Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai penggagas utama berdirinya Nahdlatul Ulama dan sering disebut sebagai "otak" NU. Beliau memiliki kontribusi besar dalam membangun jaringan intelektual di kalangan ulama dan santri melalui berbagai forum diskusi dan organisasi. Melalui Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Syubbanul Wathan, KH. Abdul Wahab Hasbullah berhasil menanamkan kesadaran kepada para ulama mengenai pentingnya membentuk organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan umat Islam secara bersama-sama.

Sebagai seorang ulama yang memiliki wawasan luas, KH. Abdul Wahab Hasbullah memahami pentingnya keberadaan organisasi yang dapat menjaga ajaran Islam moderat sekaligus mempertahankan tradisi keagamaan Islam yang telah berkembang di Indonesia. Beliau juga menyadari bahwa umat Islam saat itu menghadapi tantangan besar berupa munculnya berbagai paham keagamaan radikal yang berpotensi mengganggu kerukunan sosial dan keberagaman kehidupan beragama di Nusantara.Bersama KH. Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan NU di Surabaya pada tahun 1926 sebagai bentuk usaha untuk menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dan mempertahankan tradisi Islam Nusantara dari pengaruh paham-paham yang dianggap dapat merusak nilai budaya dan tradisi lokal masyarakat Indonesia.

c. KH. Wahid Hasyim

KH. Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh NU yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau terlibat dalam perumusan dasar negara sebagai anggota Panitia Sembilan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam Panitia Sembilan, KH. Wahid Hasyim ikut berkontribusi dalam penyusunan Piagam Jakarta yang menjadi dasar penting dalam pembentukan konstitusi negara Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, KH. Wahid Hasyim juga dipercaya menjadi pelaksana kegiatan harian Shumubu atau Kantor Urusan Agama serta menjabat sebagai Ketua II MASYUMI mendampingi KH. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Umum. Selain aktif dalam bidang politik dan pemerintahan, beliau turut berperan dalam pembentukan kekuatan pertahanan umat Islam. Ketika pemerintah Jepang meminta para santri untuk bergabung dalam Heiho dan dikirim ke Burma, KH. Wahid Hasyim menolak usulan tersebut dan mengajukan alternatif agar santri diberikan pelatihan militer untuk kepentingan pertahanan dalam negeri. Gagasan tersebut kemudian melahirkan Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin.

Keterlibatan KH. Wahid Hasyim dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh NU tidak hanya berperan dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam perjuangan politik dan kebangsaan Indonesia. (Asifa Nurfadilah, Agus Mulyana, dan Andi Suwirta, 2020: 26-27).

d. KH. Zainul Arifin

KH. Zainul Arifin dikenal sebagai tokoh NU yang memimpin Laskar Hizbullah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Laskar Hizbullah berawal dari usulan KH. Wahid Hasyim kepada pemerintah Jepang agar para santri memperoleh pelatihan militer untuk kepentingan pertahanan dalam negeri. Melalui kepemimpinannya, banyak santri kemudian terlibat secara langsung dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Peran KH. Zainul Arifin memperlihatkan bahwa kalangan ulama dan santri tidak hanya aktif dalam bidang dakwah dan pendidikan, tetapi juga berkontribusi besar dalam perjuangan nasional. Keterlibatan para santri dalam Laskar Hizbullah menjadi bukti bahwa NU memiliki peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Peranan Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Kebangsaan Indonesia Tahun 1908–1927

a. Mendirikan Pesantren dan Madrasah sebagai Basis Perlawanan Kultural

Salah satu peranan paling penting Nahdlatul Ulama (NU) dalam pergerakan kebangsaan Indonesia tahun 1908–1927 adalah membangun kekuatan umat melalui jalur pendidikan Islam. Bagi kalangan ulama tradisional, pendidikan merupakan sarana utama untuk mempertahankan identitas keislaman masyarakat pribumi sekaligus membangun kesadaran kebangsaan di tengah tekanan kolonial Belanda. Karena itu, sebelum NU resmi berdiri pada tahun 1926, para ulama pesantren telah terlebih dahulu membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berfungsi bukan hanya sebagai pusat pengajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan sosial dan kebangsaan. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah KH. Hasyim Asy'ari yang mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng pada tahun 1899.

Pesantren Tebuireng berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Jawa dan menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai daerah. Di pesantren ini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama melalui kitab kuning, tetapi juga ditanamkan nilai kedisiplinan, kemandirian, solidaritas sosial, dan kecintaan terhadap tanah air. Pendidikan

pesantren membentuk karakter santri agar mampu mempertahankan agama dan bangsa dari pengaruh kolonialisme serta westernisasi yang dibawa Belanda.Selain Tebuireng, KH. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan di Surabaya pada tahun 1916. Madrasah ini menjadi simbol kebangkitan pendidikan Islam tradisional yang mulai mengadopsi sistem pendidikan modern.

Bangunan madrasah tersebut cukup besar dan bertingkat, menunjukkan bahwa kalangan pesantren mampu bersaing dengan lembaga pendidikan modern milik kolonial maupun kaum reformis. Madrasah Nahdlatul Wathan kemudian berkembang dengan membuka cabang di berbagai kota seperti Malang, Semarang, Gresik, dan Jombang. Madrasah-madrasah tersebut juga menjadi tempat lahirnya organisasi Jam'iyyatun Nasihin yang berfungsi sebagai wadah kaderisasi para pendakwah. Melalui organisasi ini, para ulama NU membangun jaringan dakwah yang luas di tengah masyarakat. Dakwah yang dilakukan tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan umat, semangat gotong royong, dan perlunya melawan penindasan kolonial secara moral dan kultural. Dalam konteks pergerakan nasional, pesantren dan madrasah memiliki fungsi strategis sebagai alat perlawanan non-konfrontatif terhadap Belanda. NU menyadari bahwa perlawanan bersenjata sering kali berakhir dengan kekalahan akibat kekuatan militer kolonial yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, pendidikan dipilih sebagai sarana perjuangan jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang sadar agama, memiliki identitas kebangsaan, dan mampu mandiri secara sosial maupun intelektual (Fatihah, 2019).

b. Mempertahankan Tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah di Tengah Arus Reformisme Islam

Peranan NU dalam pergerakan kebangsaan juga terlihat dalam upayanya mempertahankan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah berkembangnya gerakan reformisme Islam pada awal abad ke-20. Pada masa tersebut, muncul organisasi-organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad yang mengusung gagasan pemurnian Islam dan menolak sejumlah tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat Nusantara.Kelompok reformis menilai praktik seperti tahlilan, ziarah kubur, maulid nabi, tawassul, dan pembacaan doa bersama sebagai bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Sebaliknya, kaum tradisionalis yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah memandang praktik-praktik tersebut sebagai bagian dari budaya Islam Nusantara yang telah lama hidup di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Perseteruan antara kaum tradisionalis dan reformis semakin memuncak dalam Kongres al-Islam tahun 1922 di Cirebon. Dalam forum tersebut, kelompok tradisionalis mendapat tekanan keras dan bahkan dituduh melakukan praktik syirik dan kafir karena mempertahankan tradisi keagamaan lokal. Situasi ini membuat para ulama pesantren merasa perlu membentuk organisasi sendiri yang dapat melindungi ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah sekaligus menjaga stabilitas umat Islam tradisional. Dalam konteks pergerakan nasional, upaya NU mempertahankan tradisi Islam Nusantara memiliki dampak sosial yang sangat besar. NU berhasil menjaga identitas keislaman masyarakat Indonesia agar tidak tercerabut dari akar budaya lokal. Selain itu, NU juga menanamkan sikap moderat dan toleran sehingga perbedaan pemahaman keagamaan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan perjuangan bangsa. NU menegaskan bahwa Islam dan budaya lokal dapat berjalan berdampingan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sikap ini kemudian menjadi salah satu kekuatan utama NU dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk (Taslima, 2020: 154-155).

c. Pembentukan Komite Hijaz dan Berdirinya Nahdlatul Ulama Tahun 1926

Lahirnya NU secara resmi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik Islam internasional, khususnya perkembangan di wilayah Hijaz (Mekah dan Madinah). Pada tahun 1924-1925, wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Dinasti Saudi yang berhaluan Wahabi. Pemerintahan baru ini dikhawatirkan akan melarang berbagai praktik keagamaan tradisional yang biasa dilakukan umat Islam Nusantara di tanah suci. Menjelang Kongres al-Islam di Bandung pada Januari 1926, kelompok reformis mengadakan rapat di Cianjur untuk menentukan delegasi Indonesia yang akan dikirim ke Mekah. Namun, kaum tradisionalis tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. KH. Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan agar aspirasi ulama tradisional mengenai praktik keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah turut dibawa ke Mekah, tetapi usulan tersebut ditolak.

Penolakan tersebut mendorong kaum tradisionalis membentuk Komite Hijaz pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Komite ini bertujuan memperjuangkan kebebasan umat Islam dalam menjalankan tradisi keagamaannya di tanah suci. Dari forum pembentukan Komite Hijaz inilah lahir organisasi Nahdlatul Ulama yang berarti "Kebangkitan Ulama". Berdirinya NU menandai lahirnya organisasi besar yang mewakili kepentingan umat Islam tradisional di Indonesia.NU kemudian berkembang bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Organisasi ini berhasil menyatukan para ulama pesantren dalam satu wadah perjuangan yang lebih terorganisasi dan sistematis. Berdirinya NU juga menjadi bukti bahwa kaum tradisionalis memiliki kesadaran politik dan kebangsaan yang kuat dalam menghadapi kolonialisme serta perubahan dunia Islam internasional (Imanita dkk., 2025: 4).

d. Strategi Non-Konfrontatif melalui Konsolidasi Pesantren

Setelah berdiri, NU menjalankan strategi perjuangan yang berbeda dibandingkan organisasi pergerakan lain yang cenderung menggunakan pendekatan politik praktis atau konfrontasi langsung terhadap kolonialisme Belanda. NU memilih strategi perjuangan yang bersifat kultural dan moral dengan memperkuat basis-basis keagamaan di tengah masyarakat. Strategi ini dilakukan melalui konsolidasi pesantren, pengadaan majelis taklim dan pengajian kitab, serta pengembangan pendidikan non-formal untuk memberantas buta huruf di kalangan rakyat. Pesantren-pesantren dijadikan pusat pembinaan masyarakat sekaligus tempat penyebaran gagasan kebangsaan.

Pesantren Tebuireng di Jombang menjadi salah satu pusat konsolidasi terbesar. Pesantren ini berhasil menghimpun sekitar seratus kiai dari berbagai daerah di Jawa dan Madura. Melalui jaringan ulama tersebut, pesan-pesan kebangsaan dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme disebarkan secara hati-hati tanpa menimbulkan kecurigaan dari pemerintah Belanda.Pendekatan non-konfrontatif ini terbukti efektif karena memungkinkan NU terus bergerak di tengah pengawasan ketat kolonial. Jika organisasi lain sering mengalami penindasan akibat perlawanan terbuka, NU justru memperkuat pengaruhnya melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat akar rumput. Strategi ini menjadikan NU mampu membangun kesadaran kolektif umat Islam secara bertahap namun kuat dan berkelanjutan (Imanita dkk., 2025: 8-9).

e. Menanamkan Nilai Kemandirian dan Nasionalisme melalui Dakwah Massal

NU juga berperan besar dalam menanamkan nilai kemandirian dan nasionalisme melalui dakwah massal. Para kiai dan ulama NU secara rutin mengadakan pengajian umum, ceramah agama, majelis taklim, dan peringatan hari besar Islam di berbagai daerah pedesaan. Dalam kegiatan tersebut, para ulama tidak hanya membahas persoalan ibadah dan akhlak, tetapi juga

menanamkan kesadaran bahwa penjajahan merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka mengajarkan pentingnya persatuan umat, semangat gotong royong, serta perlunya membangun kemandirian ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada kolonial.

Melalui pendekatan religius, NU berhasil membangun kesadaran nasional di kalangan masyarakat bawah yang pada masa itu sebagian besar masih buta huruf dan jauh dari pendidikan modern. Pendekatan agama terbukti lebih mudah diterima masyarakat karena menyentuh aspek emosional dan spiritual mereka. Para ulama NU juga mengajarkan konsep hubb al-wathan (cinta tanah air) sebagai bagian dari keimanan. Nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia, terutama di kalangan santri dan masyarakat pesantren. Dengan demikian, NU tidak hanya berperan dalam menjaga kehidupan keagamaan masyarakat, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia melalui pendekatan spiritual dan kultural.

f. Membangun Persatuan Umat Islam di Tengah Perbedaan

Pada masa pergerakan nasional, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar berupa perbedaan daerah, bahasa, budaya, dan organisasi yang sering memicu perpecahan. Dalam situasi tersebut, NU hadir sebagai organisasi yang mampu menyatukan umat Islam tradisional dari berbagai daerah.NU menggunakan prinsip al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Prinsip ini membuat NU mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi Islam Nusantara.

Melalui prinsip tersebut, NU berhasil menghimpun para kiai, santri, dan masyarakat awam dalam satu organisasi yang memiliki arah perjuangan sama, yaitu mempertahankan agama dan memperjuangkan kepentingan bangsa. Persatuan umat Islam tradisional ini memperkuat posisi tawar masyarakat pribumi di hadapan pemerintah kolonial Belanda sekaligus memperbesar pengaruh gerakan kebangsaan Indonesia.Selain itu, persatuan yang dibangun NU juga membantu menciptakan stabilitas sosial di tengah konflik pemikiran antara kelompok tradisionalis dan reformis. NU berupaya menjaga agar perbedaan pemahaman keagamaan tidak berkembang menjadi perpecahan yang dapat melemahkan perjuangan bangsa.

g. Peran Sosial NU dalam Memperkuat Solidaritas Masyarakat

Selain bergerak dalam bidang agama dan pendidikan, NU juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Organisasi ini memperkuat solidaritas masyarakat melalui kegiatan keagamaan bersama seperti tahlilan, selamatan, pengajian, dan peringatan hari besar Islam.NU juga aktif mengorganisasi kegiatan gotong royong dan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kebijakan kolonial Belanda. Kehadiran NU di tengah rakyat membuat organisasi ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat kecil.

Peran sosial NU sangat penting karena masyarakat pada masa kolonial mengalami tekanan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial akibat eksploitasi Belanda. Dalam kondisi tersebut, NU hadir sebagai kekuatan sosial yang membantu memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga stabilitas sosial di pedesaan. Kedekatan NU dengan rakyat membuat organisasi ini memperoleh dukungan luas dari masyarakat bawah. Dengan demikian, NU tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai organisasi sosial yang memahami penderitaan rakyat dan berupaya memberikan solusi nyata terhadap persoalan masyarakat.

h. Menanamkan Sikap Moderat dan Toleran sebagai Dasar Persatuan Bangsa

Kontribusi penting lainnya dari NU adalah penanaman sikap moderat dan toleran di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. NU secara konsisten mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan bangsa. Para ulama NU menolak praktik takfiri atau mengafirkan sesama muslim yang berbeda pendapat. Sebaliknya, NU mendorong dialog, musyawarah, dan sikap saling menghormati antar kelompok masyarakat. Sikap ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah berkembangnya konflik ideologis antarorganisasi Islam pada awal abad ke-20. Sikap moderat yang dikembangkan NU juga memperlihatkan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Dalam konteks pergerakan nasional, moderasi NU membantu menciptakan persatuan yang menjadi modal penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia (Adnan, Imawan, & Ardianto, 2024).

i. Keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan RI

Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan kelanjutan langsung dari dinamika pergerakan nasional periode 1908–1927 yang ditandai oleh tumbuhnya kesadaran kebangsaan melalui pendidikan pesantren, dakwah, serta konsolidasi ulama tradisional. Tradisi perjuangan tersebut kemudian berkembang menjadi keterlibatan politik-keagamaan yang lebih formal ketika NU ikut serta dalam proses perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam konteks ini, tokoh NU seperti KH. Wahid Hasyim berperan penting dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945.

Ia menjadi salah satu representasi kelompok Islam yang aktif memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam perumusan dasar negara, khususnya terkait hubungan antara agama dan negara. Keterlibatan tersebut juga berlanjut dalam keanggotaan Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan awal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Dalam proses perumusan tersebut, terjadi perdebatan mengenai rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang dikenal sebagai "tujuh kata". Rumusan ini kemudian mendapat keberatan dari kelompok Kristen Indonesia Timur karena dianggap berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain.

Demi menjaga persatuan nasional, kalangan Islam termasuk tokoh-tokoh NU menerima perubahan rumusan tersebut pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, sehingga sila pertama Pancasila menjadi lebih inklusif dan dapat diterima seluruh golongan. Sikap tersebut mencerminkan karakter perjuangan NU yang sejak masa pergerakan nasional 1908–1927 telah menekankan keseimbangan antara nilai keislaman dan kepentingan kebangsaan. NU tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam, tetapi juga mengedepankan persatuan bangsa sebagai fondasi utama berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan NU dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan RI dapat dipahami sebagai puncak dari proses panjang konsolidasi ulama pesantren dalam membangun kesadaran nasional, yang berakar dari gerakan pendidikan, dakwah, dan organisasi sosial-keagamaan pada masa pergerakan nasional.(Amin Farih,2016: 268-271).

Dampak Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Pergerakan Indonesia

a. Penguatan sikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda

Pada periode awal berdirinya NU (1926–1927), organisasi ini menunjukkan sikap politik yang cukup tegas terhadap sistem kolonial Belanda. Salah satu bentuk nyata dari sikap tersebut adalah penolakan terhadap keterlibatan dalam lembaga kolonial seperti Volksraad. Penolakan ini

bukan sekadar sikap politik, tetapi juga mencerminkan pandangan ideologis bahwa partisipasi dalam sistem kolonial dapat dianggap sebagai bentuk legitimasi terhadap penjajahan.NU memandang bahwa struktur politik kolonial tidak memberikan ruang yang adil bagi masyarakat pribumi, sehingga keterlibatan di dalamnya justru dapat melemahkan semangat perlawanan. Sikap nonkooperatif ini kemudian memperkuat salah satu arus penting dalam pergerakan nasional Indonesia, yaitu gerakan yang menolak kompromi dengan pemerintah kolonial.Lebih jauh, sikap ini juga memperkuat posisi umat Islam dalam pergerakan nasional sebagai kelompok yang memiliki kesadaran politik tersendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada organisasi politik sekuler maupun struktur kolonial. Dengan demikian, NU turut memperluas spektrum perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia (Farih, 2016: 256).

b. Penanaman nasionalisme melalui konsep jihad sosial-keagamaan

NU berperan penting dalam membangun pemahaman baru tentang konsep jihad dalam konteks kolonialisme. Jihad fi sabilillah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perang fisik semata, tetapi diperluas menjadi perjuangan moral, sosial, ekonomi, dan intelektual dalam melawan ketidakadilan. Dalam konteks penjajahan Belanda, konsep jihad ini digunakan untuk membangun kesadaran umat Islam bahwa melawan kolonialisme merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dengan demikian, perjuangan melawan penjajah tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga legitimasi keagamaan yang kuat.

Selain itu, NU melalui kegiatan dakwahnya juga berperan dalam menjaga identitas keislaman masyarakat bumiputera dari pengaruh misi kristenisasi yang didukung oleh sistem kolonial. Dakwah tidak hanya menjadi sarana penyebaran ajaran agama, tetapi juga menjadi media mobilisasi sosial untuk memperkuat solidaritas umat. Dengan kombinasi antara nilai keagamaan dan kesadaran kebangsaan, NU berhasil membentuk nasionalisme religius yang menjadi salah satu karakter penting dalam pergerakan Indonesia (Asiah & Subakti, 2024: 7).

c. Perlawanan terhadap kolonialisme melalui pendidikan Islam

Salah satu kontribusi paling signifikan NU dalam pergerakan nasional adalah pengembangan sistem pendidikan pesantren dan madrasah sebagai alternatif terhadap pendidikan kolonial Belanda. Sistem pendidikan kolonial bersifat elitis, diskriminatif, dan terbatas hanya untuk kelompok tertentu, sehingga sebagian besar masyarakat pribumi tidak memiliki akses pendidikan formal.Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, NU memperkuat pesantren sebagai lembaga pendidikan yang inklusif dan berbasis masyarakat. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter mandiri, disiplin, dan memiliki kesadaran sosial. Pendidikan ini secara tidak langsung membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sistem kolonial.

Pada Muktamar NU tahun 1927, organisasi ini juga melakukan upaya penggalangan dana untuk memperluas jaringan pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya bergerak dalam bidang ideologis, tetapi juga dalam aspek struktural melalui penguatan institusi pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme, bukan melalui kekerasan, tetapi melalui pembentukan generasi yang sadar dan mandiri (Asiah & Subakti, 2024: 9–10).

d. Perubahan orientasi fikih menuju kewajiban melawan penjajah

Dalam perkembangan awal NU, terjadi dinamika pemikiran keagamaan yang cukup signifikan, khususnya dalam bidang fikih. Jika sebelumnya hukum Islam lebih banyak dibahas dalam konteks ibadah dan sosial internal umat, maka dalam konteks kolonialisme muncul

reinterpretasi bahwa melawan penjajah merupakan bagian dari kewajiban agama. Pemikiran ini menjadi penting karena memberikan dasar teologis bagi perjuangan politik umat Islam. Dengan adanya legitimasi agama, perlawanan terhadap kolonialisme tidak lagi dipandang sebagai tindakan politik semata, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius. Perubahan orientasi ini kemudian menjadi fondasi penting bagi lahirnya Resolusi Jihad 1945 yang dikeluarkan NU pada masa revolusi kemerdekaan. Dengan demikian, NU menunjukkan kemampuan adaptasi pemikiran Islam terhadap konteks sosial-politik yang berkembang.T ransformasi ini juga menandai pergeseran NU dari sekadar organisasi keagamaan menjadi kekuatan sosial-politik yang memiliki peran dalam perjuangan kebangsaan (Aprilia, Sugiyanto & Handayani, 2017: 260).

e. Penguatan perlawanan kultural melalui sistem pendidikan pesantren

Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren yang dikembangkan NU juga berfungsi sebagai pusat perlawanan kultural terhadap dominasi kolonial. Perlawanan ini tidak bersifat langsung atau konfrontatif, tetapi dilakukan melalui pembentukan nilai, tradisi, dan pola pikir masyarakat. Pesantren membentuk sistem pendidikan yang berbasis pada kemandirian, kesederhanaan, dan kedekatan sosial antara guru dan santri. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan kolonial yang bersifat hierarkis dan eksklusif. Dengan demikian, pesantren menjadi ruang alternatif bagi masyarakat pribumi untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus memperkuat identitas sosial mereka. Selain itu, pesantren juga menjadi pusat penyebaran nilai-nilai resistensi terhadap ketidakadilan kolonial melalui pendekatan kultural dan keagamaan. Nilai-nilai ini tidak disampaikan secara frontal, tetapi melalui pendidikan akhlak, pengajian, dan tradisi keilmuan Islam.Dengan cara ini, NU membangun bentuk perlawanan jangka panjang yang bersifat struktural dan kultural, yang dampaknya tetap bertahan bahkan hingga masa setelah kolonialisme berakhir.

Secara keseluruhan, Nahdlatul Ulama memainkan peran penting dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan di Indonesia melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. NU tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang terlibat dalam dinamika pergerakan nasional. Melalui pendidikan pesantren, dakwah, dan organisasi sosial, NU berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat nasionalisme. Hal ini menghasilkan bentuk perlawanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis dan kultural. Peran NU dalam periode awal ini juga menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan mobilisasi sosial yang efektif dalam melawan kolonialisme. Dengan demikian, NU menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan gerakan nasional Indonesia yang lebih terorganisasi, berkelanjutan, dan berakar kuat di masyarakat.

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang lahir dari proses panjang dinamika sosial, politik, dan keagamaan pada awal abad ke-20. NU tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil transformasi dari berbagai organisasi pendahulu seperti Nahdlatuttujjar, Taswirul Afkar, dan Nahdlatul Wathan yang mencerminkan perkembangan pemikiran ulama pesantren dalam merespons tantangan zaman, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun intelektual.NU memiliki peran yang sangat signifikan dalam pergerakan nasional Indonesia, terutama dalam membangun kesadaran kebangsaan berbasis nilai-nilai Islam. Peran tersebut terlihat melalui penguatan pendidikan pesantren sebagai basis perlawanan kultural terhadap

kolonialisme, pengembangan dakwah yang menanamkan konsep jihad sosial-keagamaan, serta sikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Selain itu, NU juga berkontribusi dalam mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah arus reformisme Islam serta membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat pribumi. Lebih jauh, NU berhasil mengintegrasikan nilai keagamaan dengan semangat kebangsaan melalui pendekatan pendidikan, sosial, dan kultural. Hal ini menjadikan NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang berperan dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Dengan demikian, NU dapat dipahami sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam proses pembentukan kesadaran kolektif bangsa serta perjuangan menuju kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan M., Imawan, S. A., Ardianto H. T. (2024). Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Menjaga Kebinekaan Bangsa. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. 4(1): 76–90.

Aprilia A. K, Sugiyanto S, Handayani S. (2017). The Role of Nahdlatul Ulama on Indonesian National Movement on 1926-1945. *Jurnal Historica*. 1(2): 260.

Aprillia N, dkk. (2025). Peran KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah dalam pendirian Nahdlatul Ulama. *Jurnal Kajian Islam dan Kebangsaan*. 409–410.

Asiah N, Subakti G. E. (2024). Upaya Nahdlatul Ulama dalam Melawan Kolonialisme dan Imperialisme pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1926–1942. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat.* 7(2): 7-10

Farih A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 24(2): 268-271

Fatihah I. (2019). *Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bidang Pendidikan Karakter*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Imanita M, Perdana Y, Pratama R. A. (2025). Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan sosial politik pada masa pergerakan nasional. *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP UNJA.* 1-12.

Nasrullah, Bahaking Rama, dan Andi Achruh. (2012). Nahdlatul Ulama, Tokoh dan Kegiatannya dalam Dunia Pendidikan. *Nizam: Jurnal Islampedia*. 2(1): 21

Nurfadilah A, Mulyana A, Suwirta A. (2020). Peranan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1942-1953. *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*. 5(1): 26-27

Ridwan, Nur Khalik, Ali Usman. (2023). *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H/1926 M*. Jakarta: LTN NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Romzi Moh. (2012). Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama.* 2(1): 42

Taslima S. U. (2020). Nahdlatul Ulama: Telaah histori perkembangan dan gerakan dakwahnya di Indonesia. *Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam).* 2(2): 151-166.